

## Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat

**Enike Tje Yustin Dima**

Prodi Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira

E-mail: enike.dima@yahoo.co.id

### Article History:

Received: 25 September 2022

Revised: 30 September 2022

Accepted: 30 September 2022

**Keywords:** Peran, BUMDes, Ekonomi desa,

**Abstract:** Penelitian ini berfokus pada peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman: mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan. Akibatnya, peran BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa yaitu peran BUMDes dalam hal pelayanan mempengaruhi kemandirian ekonomi desa, dan peran BUMDes dalam hal akuntabilitas memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan awal masyarakat. Desa Dampak, peran BUMDes dalam meningkatkan taraf hidup, telah mempengaruhi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Peran BUMDes dalam mematuhi peraturan perundang-undangan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola potensi desa.

## PENDAHULUAN

Desa Keunheun merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang Barat yang terkenal dengan banyaknya desa yang kemudian digabung menjadi satu desa. Secara tipologis desa ini membujur dari selatan ke utara, memiliki luas +2.146 ha, dan batas wilayahnya adalah: Utara: Desa Borok, Selatan: Desa Oetmanunu, Timur: Desa Batakut, Barat: Laut. Secara administratif, Desa Quan Hung terbagi menjadi 5 desa, 6 RW dan 12 RT yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama RT. Mulai tahun 2022, Desa Kuanheun dikelola oleh Bapak Semin R. Paul adalah walikota desa.

Desa Keunheun terkenal dengan Desa KB, salah satu dari tiga Program Nawacita (Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang dicanangkan di tingkat nasional oleh Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) pada Februari 2016). Dari pinggiran kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu RW/. Desa ini juga memiliki atraksi seperti Pantai Bariana, Pantai Inokiu, Gua Taunesi, dan Gua Oaana (objek wisata baru).

Mengenai tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa tujuan yang ingin

dicapai melalui pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan tindakan seseorang. Kemandirian masyarakat adalah keadaan yang dialami oleh suatu masyarakat untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menggunakan kekuatan atau keterampilannya untuk melakukan apa yang dianggapnya cocok untuk mencapai solusi atas masalah yang dimilikinya. Menggunakan keterampilan merupakan konsep kebutuhan masyarakat.

Secara umum, ada empat tahapan dalam pembentukan BUMDes. Pertama, pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk mendirikan BUMDes, BUMDes dikelola, kebutuhan personel ditentukan, pemantauan dan evaluasi dilakukan, dan akhirnya tercapai akuntabilitas. Pembekalan manajer diadakan. Dalam pekerjaan sehari-hari, para pengelola harus mengacu pada aturan-aturan yang disepakati secara umum yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib (AD/ART) BUMDes dan Prinsip Tata Kelola BUMDes.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti ingin memahami, mengamati, mendalami dan lebih memperjelas peran BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1992) dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai data jenuh. Selanjutnya, Miles dan Huberman mengkategorikan kegiatan menganalisis data ke dalam fase pembersihan data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran BumDes Ditinjau Dari Layanan-Keuntungan-Keberlangsungan**

BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi desa, berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, selalu beroperasi dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Menurut PKDSP (2007), 'usaha desa' adalah segala jenis usaha yang mencakup jasa ekonomi desa. 2) Pembagian 9 sembako desa. 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis. 4) industri rakyat dan kerajinan tangan.

Secara umum pelayanan BUMDes bersifat profesional dan fleksibel. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan, tetapi juga mendorong pengembangan usaha yang sebenarnya di BUMDes, menyerap lebih banyak tenaga kerja dan Pendapatan dapat ditingkatkan. Selain itu menumbuhkan kreativitas dalam kegiatan informal lainnya dan kewirausahaan di komunitas kerjanya. Keuntungan dari usaha nyata yang diciptakan oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa memaksimalkan manfaat dan manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat yang menjalankan usaha BUMDes tersebut.

Dari semua penjabaran ini, kita tahu bahwa peran BUMDes yang sangat baik dapat dilihat dari sisi kinerja, profit dan sustainability. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdampak besar pada aspek lainnya juga. Pelayanan yang baik mendorong masyarakat untuk bergabung dengan BUMDes, dan lebih banyak pelanggan berarti lebih banyak pendapatan, dan pada akhirnya lebih banyak keuntungan. Pendapatan dan laba yang terus meningkat akan membuat BUMDes itu sendiri tetap lestari. Di sisi lain, pelayanan BUMDes berbasis keluarga juga dapat menimbulkan masalah, karena fasilitas yang diberikan oleh pengelola BUMDes dapat dianggap

tidak sesuai untuk perusahaan. Alur dari aplikasi pinjaman hingga penarikan dana dan pengembalian dana Semua transaksi masih tercatat dalam buku BUMDes, namun pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan tidak benar. Kenyamanan kredit dan pelayanan keluarga merupakan tujuan utama BUMDes, namun akan lebih baik jika BUMDes memiliki batasan untuk membuat perintah eksekutif yang akan memicu tertib pembayaran dari pelanggan.

### **Peran BUMDes Ditinjau Dari Akuntabilitas-Perkembangan Aset Desa**

Hayuna dkk (2014) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk berhasil membangun desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Tingkat pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi BUMDes dalam mengelola dan memaksimalkan kekayaan desa. Hal ini sejalan dengan pasal 78 PP No. 72 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan awal desa.

Menurut Hayyuna dkk. (2014), strategi peningkatan kekayaan desa antara lain: Pertama, amati lingkungan Anda. Hasilnya akan membantu menentukan potensi kegiatan usaha yang cocok untuk diterapkan pada BUMDes. Strategi yang dapat digunakan BUMDes antara lain strategi pengembangan produk, penetapan harga, dan strategi keuangan, kemudian pengembangan strategi meliputi 1) pengembangan produk, 2) penetapan harga, dan 3) strategi keuangan. Ketiga, implementasi strategi yang diterapkan oleh BUMDes dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan desa. Keempat, kepala desa diberdayakan oleh pemerintah daerah untuk memantau dan bertanggung jawab atas BUMDes desa, dan karenanya menilai atau mengelolanya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kekayaan (peningkatan akuntabilitas) yang dilaksanakan oleh BUMDes membantu meningkatkan pendapatan desa. Karena BUMDes akan menjadi wadah bagi program-program lainnya, diharapkan semua aset desa yang dilestarikan selanjutnya dapat didokumentasikan, dipertanggungjawabkan dan dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan BUMDes itu sendiri.

### **Peran BUMDes Ditinjau Dari Ketaatan Pada Peraturan Dan Perundang-Undang**

Selain tinjauan terhadap ketiga peran BUMDes tersebut, peran BUMDes lainnya akan ditinjau kembali dalam hal bagaimana BUMDes mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua aspek BUMDes diatur oleh hukum yang berlaku. Semua aspek BUMDes diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap standar operasional dapat mempengaruhi kinerja BUMDes. Secara sederhana, kepatuhan terhadap peraturan ini dapat dijelaskan dengan pelaporan tahunan.

Dalam pengelolaan BUMDes yang baik, peraturan perundang-undangan menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan dan peran BUMDes secara optimal. Kepatuhan pengurus BUMDes terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu aspek dalam mengkaji peran BUMDes. Manajemen prosedural memastikan hasil terbaik untuk kepentingan BUMDes sekaligus juga bermanfaat bagi masyarakat. Pendapatan dari BUMDes pembangunan ekonomi desa yang didukung BUMDes dikelola sesuai prosedur, peraturan akan berjalan dengan baik, dan terus berkembang untuk kepentingan desa yang berpartisipasi dalam masyarakat.



**Gambar 1. Kantor Kepala Desa**

. BUMDes dikelola sesuai dengan standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, distribusi SHU, penetapan tarif, dan standar persyaratan peminjaman. Namun karena standar operasional pelayanan dijalankan pada hubungan kekeluargaan dan jaminan kepercayaan, sering terjadi kredit macet karena nasabah gagal melunasi pinjamannya.

### **Peran BUMDes Ditinjau Dari Tafar Hidup Pengurus-Komisaris-Masyarakat**

Dalam kaitannya dengan salah satu tujuan BUMDes, kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi, salah satu misi BUMDes adalah meningkatkan taraf hidup para pengelola, pejabat, dan masyarakatnya. Jika BUMDes terbentuk di desa, pasti akan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk kemampuan menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga mengurangi pengangguran desa.

Selain alokasi rutin dana dari BUMDes untuk pengembangan sumber daya manusia, pelatihan juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi manajemen. Meningkatkan peran BUMDes dan menjaga keberlanjutan program BUMDes di desa.

### **Peran BUMDes Dalam Mendukung Ekonomi Desa**

Sebagai contoh, sebagian besar BUMDes yang telah memberikan dampak positif mampu menyerap program bantuan pemerintah, menjaga aset program yang ada, menjaga aset program yang ada, dan menjaga aset desa sendiri. (peningkatan akuntabilitas) yang dilaksanakan oleh BUMDes dapat merespon program bantuan yang diterima oleh pemerintah lain, yang secara tidak langsung masuk ke desa. dari properti.

Kami menemukan bahwa dengan meningkatnya PAD, masih ada beberapa hambatan dalam pemberian dosis. Kendala pengelolaan aset BUMDes adalah sulitnya mengembangkan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana dan prasarana, dan rendahnya pengawasan oleh pemerintah daerah.

### **Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa**

Mengenai peran pelayanan BUMDes, diketahui terdapat perbedaan pelayanan antara BUMDes dengan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Pelayanan BUMDes didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan kepercayaan dengan pelanggan, dengan mengutamakan kenyamanan. Sebaliknya, di semua lembaga keuangan mikro lainnya, proses pemberian pinjaman harus dilakukan dengan baik dan sistematis. Selain itu, pelayanan di BUMDes profesional dan fleksibel, prosedur yang digunakan singkat sehingga tidak membebani nasabah, credit standing yang baik dan suku bunga yang relatif rendah.



**Gambar 2. BUMDes**

Mengenai peran laba BUMDes, kami menemukan bahwa laba atau pendapatan BUMDes juga dipengaruhi oleh pendapatan usaha BUMDes lainnya. B. Dari perusahaan riil yang dikelola oleh BUMDes. Perusahaan BUMD juga dapat didirikan sesuai potensinya di desa untuk memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Perkembangan bisnis nyata BUMDes ini juga berdampak pada masyarakat sekitar. Bisnis ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang yang menjalankan bisnis BUMDes.

Peningkatan pelayanan, pendapatan dan keberlanjutan BUMDes akan berdampak pada peningkatan perekonomian desa. Layanan BUMDes memungkinkan nasabah menjadi lebih produktif karena peminjaman merupakan proses yang cepat dan kompleks. Pada akhirnya, uang yang dipinjam dari BUMDes dapat digunakan dalam produksi segera setelah pembelian bahan.

### **Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

Mengenai peran akuntabilitas BUMDes, diketahui bahwa strategi pengelolaan aset (peningkatan akuntabilitas) yang diterapkan oleh BUMDes berkontribusi sekaligus meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, BUMDes mampu merespon program bantuan lain yang diterima pemerintah dan secara tidak langsung mendukung dana program pemerintah yang mengalir ke desa untuk menjaga aset desa. Melalui program BUMDes ini, kita berkontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes) dan strategi yang diterapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan desa. Sebagai contoh, sebagian besar BUMDes yang terkena dampak positif mampu menyerap program bantuan pemerintah, melestarikan sumber daya program yang ada, dan melindungi aset desa

---

sendiri.

Peningkatan PAD menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala administratif seperti kesulitan dalam mengembangkan perusahaan baru, inovasi yang terbatas dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya fasilitas, dll. Ternyata, dan infrastruktur, rendahnya pengawasan oleh pemerintah daerah.

### **Peran BUMDes Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Pedesaan**

Peran BUMDes dalam kaitannya dengan aspek komisariss manajemen meningkatkan taraf hidup masyarakat diketahui mempengaruhi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama dalam hal kapasitas mereka sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan dan Keadilan Merujuk pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama dan menumbuhkan perekonomian, salah satu tugas BUMDes adalah meningkatkan taraf hidup pengurus, komisariss dan pengurus. Sebagai hasil dari pengelolaan BUMDes, kami dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pengelola dan pejabat BUMDes serta meningkatkan kesejahteraan setiap pengelola dan pejabat.

Selain BUMDes mencapai kapasitasnya untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, juga memiliki tenaga kerja yang terdidik, terlatih dan profesional untuk mendukung diversifikasi usaha BUMDes di sektor riil non-tabungan. , termasuk kurangnya sumber daya yang relevan. Area dukungan dan kredit. Selain itu, roll yang baik meningkatkan pendapatan dan keuntungan BUMDes, secara otomatis meningkatkan pendapatan pengurus dan pejabat BUMDes.

Namun, di sisi lain, tidak ada manfaat tidak langsung yang terlihat, dan lebih sedikit profesional yang menantang wirausaha karena kurangnya minat, keterampilan, dan keberanian, dan masih kurang baik manajemen maupun masyarakat memiliki kesadaran untuk mewujudkan komunitas yang sebenarnya. Pemberdayaan di sektor entitas dan usaha mikro.

### **Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes khususnya dalam aspek kepatuhan hukum dinilai berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat terutama dari segi kapasitas. Mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BUMDes dikelola sesuai dengan standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pendistribusian SHU, penetapan tarif, dan standar persyaratan peminjaman.

Namun, dibalik pencapaian tersebut, masih terdapat pemahaman yang kurang dalam pelaksanaan masyarakat tentang maksud dan tujuan pendirian BUMDes ini. BUMDes dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong kemandirian masyarakatnya, tetapi justru melayani sebagian kecil masyarakat yang mengharapkan hibah pemerintah dan merasa dana tersebut tidak perlu dikembalikan, justru menjadi tempat ketergantungan. Itu subsidi pemerintah.

Stabilitas pendapatan BUMDes tidak selalu baik dan dalam perkembangannya dapat muncul banyak masalah, mulai dari masalah program simpan pinjam hingga bisnis BUMDes yang sebenarnya. Sebagian besar BUMDes juga menghadapi kredit bermasalah, namun mengingat BUMDes memenuhi misi sosial dari pemerintah, mereka harus dapat mengembalikan modal kerja (dana pinjaman) tepat waktu seperti lembaga keuangan pada umumnya.

Selain itu, masih ada ide-ide buruk di masyarakat yang mengurangi pengembalian dana. Bisa juga terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan pengelola BUMDes, yang berujung pada berbagai masalah seperti: Dari penyalahgunaan dana hingga hilangnya dana karena alasan tertentu. Di BUMDes, nasabah tidak dapat mengembalikan dana pinjaman karena kesalahan prosedur karena penyaluran dana yang tidak tepat, sehingga banyak program yang mati sebelum waktunya.

### **KESIMPULAN**

BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Peran BUMDes dalam hal pelayanan mempengaruhi kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes dalam hal akuntabilitas terkait dengan peningkatan pendapatan awal desa, dan peran BUMDes dalam peningkatan taraf hidup, pertumbuhan dan pemerataan, serta peran BUMDes dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mempengaruhi kemampuan desa dalam mengelola potensinya.

### **DAFTAR REFERENSI**

[Ijae.Ejournal.Unri.ac.id/ index/.php./IJAE/article/viewFile/496/462](http://Ijae.Ejournal.Unri.ac.id/index/.php/IJAE/article/viewFile/496/462)

[IaiJawaTimur.or.id/ course/ interest/ detail/ 21](http://IaiJawaTimur.or.id/course/interest/detail/21)

[JurnalFisip.Unjani.ac.id./Index.php/Jurnal-academia-praja/article/view/959](http://JurnalFisip.Unjani.ac.id/Index.php/Jurnal-academia-praja/article/view/959)